

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 106/DIKTI/Kep/1996

tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI S2 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN
SOSIAL PADA IKIP YOGYAKARTA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan S2 yang memiliki kemampuan akademik di bidang pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, perlu diselenggarakan Program Studi S2 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial;
- b. bahwa IKIP Yogyakarta memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi S2 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial pada IKIP Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 268 Tahun 1965;
 - b. Nomor 44 Tahun 1974;
 - c. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
 - d. Nomor 165/M Tahun 1993;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
 - b. Nomor 0686/U/1991;
 - c. Nomor 0464/O/1992;
 - d. Nomor 036/U/1993;
 - e. Nomor 056/U/1994;
 - f. Nomor 0343/U/1994;
 - g. Nomor 0174/O/1995;
- 5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

M E M U T U S K A N .

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial pada IKIP Yogyakarta;
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Magister (S2).
- Ketiga : Lulusan dari Program Studi S2 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial bergelar akademik Magister Pendidikan disingkat M.Pd. yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi S2 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial tersebut, dibebankan pada anggaran IKIP Yogyakarta.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

tanggal 18 April 1996



DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

BAMBANG SOEHENDRO

NIP. 130 344 444